



PERAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH (LKMS) DAN KEBERLANJUTAN EKONOMI KREATIF DI ERA DIGITAL DI JAWA BARAT

Mariyah Ulfah

Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon

mariyahulfah05@uinssc.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) terhadap keberlanjutan ekonomi kreatif (ekraf) di Jawa Barat dengan memasukkan dimensi adopsi digital sebagai variabel mediasi dan kebijakan sebagai variabel moderasi. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan model Structural Equation Modeling–Partial Least Squares (SEM–PLS) berdasarkan data survei terhadap 220 pelaku usaha mikro dan kecil pada subsektor kuliner, fesyen, dan kriya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LKMS berpengaruh signifikan terhadap adopsi digital dan keberlanjutan ekraf, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adopsi digital terbukti menjadi faktor kunci yang memperkuat keberlanjutan usaha kreatif, sedangkan kebijakan berperan memperkuat hubungan LKMS terhadap adopsi digital meskipun hanya marginal terhadap keberlanjutan. Nilai R^2 sebesar 0,31 pada adopsi digital dan 0,56 pada keberlanjutan ekraf menunjukkan daya jelaskan model cukup kuat. Temuan ini menegaskan pentingnya integrasi pembiayaan syariah, pendampingan, dan digitalisasi sebagai strategi komprehensif dalam mendukung keberlanjutan usaha kreatif di tingkat daerah. Penelitian ini berkontribusi bagi pengembangan literatur keuangan mikro syariah dan ekonomi kreatif, sekaligus memberikan implikasi praktis bagi kebijakan dan penguatan peran LKMS.

Kata kunci: Lembaga Keuangan Mikro Syariah, ekonomi kreatif, adopsi digital, keberlanjutan, Jawa Barat

Abstract

This study aims to analyze the role of Islamic Microfinance Institutions (LKMS) in sustaining the creative economy in West Java by incorporating digital adoption as a mediating variable and policy as a moderating variable. A quantitative approach using Structural Equation Modeling–Partial Least Squares (SEM–PLS) was employed, based on survey data from 220 micro and small enterprises in culinary, fashion, and craft subsectors. The findings reveal that LKMS significantly influence both digital adoption and creative economy sustainability, directly and indirectly. Digital adoption serves as a key factor enhancing business sustainability, while policy strengthens the effect of LKMS on digital adoption, though only marginally on sustainability. The R^2 values of 0.31 for digital adoption and 0.56 for creative economy sustainability indicate moderate to strong explanatory power of the model. These results highlight the importance of integrating Islamic financing, business mentoring, and digitalization as a

comprehensive strategy to ensure the sustainability of creative micro-enterprises at the regional level. This study contributes to the literature on Islamic microfinance and creative economy, while offering practical implications for policy and strengthening the role of LKMS.

Keywords: Islamic microfinance institutions, creative economy, digital adoption, sustainability, West Java

1. Pendahuluan

Ekonomi kreatif dewasa ini dipandang sebagai salah satu sektor unggulan yang mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan nasional. Sektor ini mengandalkan kreativitas, inovasi, dan kemampuan intelektual sebagai basis utama dalam menciptakan nilai tambah suatu produk maupun jasa. Berdasarkan laporan *Opus Creative Outlook* (2019), pada tahun 2016 kontribusi ekonomi kreatif terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional mencapai 7,44 persen, dan angka tersebut diproyeksikan meningkat hingga Rp1.102 triliun pada tahun 2018 (*Target Kontribusi Ekonomi Kreatif 2019 Untuk PDB Rp1,2 Triliun*, n.d.). Fakta tersebut menegaskan bahwa ekonomi kreatif tidak hanya berperan dalam menopang pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berpotensi menjadi sektor strategis dalam menciptakan lapangan kerja dan memperkuat daya saing bangsa.

Provinsi Jawa Barat menempati posisi penting dalam peta ekonomi kreatif Indonesia (Ginting, 2019). Hingga pertengahan 2019, Jawa Barat tercatat sebagai provinsi dengan jumlah pelaku ekonomi kreatif terbanyak, yakni mencapai lebih dari 1,5 juta unit usaha (Monica, 2021). Subsektor kuliner, fesyen, dan kriya mendominasi dengan kontribusi lebih dari 90 persen. Konstelasi tersebut menunjukkan bahwa Jawa Barat memiliki basis sosial-budaya yang kuat dalam menopang pertumbuhan ekonomi kreatif. Namun, di balik potensi besar tersebut terdapat permasalahan mendasar, yakni keterbatasan akses pembiayaan serta rendahnya literasi digital di kalangan pelaku usaha mikro dan kecil. Sebagian besar pelaku usaha kreatif menghadapi kendala dalam memperoleh akses modal dari lembaga keuangan formal, akibat prosedur administrasi yang rumit dan persyaratan agunan yang sulit dipenuhi.

Dalam konteks inilah, Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) memperoleh relevansi strategis. LKMS, yang mencakup Baitul Maal wa Tamwil (BMT), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), serta koperasi syariah, hadir sebagai lembaga yang tidak hanya berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana, tetapi juga sebagai institusi pemberdayaan masyarakat (Permana & Adhiem, 2020; Yunindya, 2014). Prinsip operasional LKMS yang berbasis syariah menekankan nilai keadilan, kebersamaan, dan kemaslahatan, sehingga lebih sesuai dengan karakteristik usaha mikro dan kecil yang menjadi mayoritas pelaku ekonomi kreatif. Selain itu, status hukum LKMS sebagai koperasi memberikan legitimasi dari sisi legalitas usaha, perizinan, serta peluang memperoleh dukungan permodalan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, LKMS berpotensi menjadi *institutional forms of creative enterprises* yang mendukung keberlanjutan sektor ekonomi kreatif.

Lebih jauh, tantangan yang dihadapi tidak hanya terkait pembiayaan, tetapi juga transformasi digital. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah

mengubah ekosistem ekonomi global, termasuk dalam ranah usaha mikro (Basry & Sari, 2018; Saba, 2024). Digitalisasi membuka peluang pasar yang lebih luas, efisiensi operasional, serta inovasi model bisnis. Akan tetapi, sebagian besar usaha mikro kreatif di Jawa Barat masih menunjukkan tingkat adopsi teknologi yang rendah. Data Sensus Ekonomi Indonesia (2023) menunjukkan bahwa hanya sekitar 9,76 persen pelaku usaha mikro kecil yang memanfaatkan internet dalam aktivitas usaha mereka. Kondisi ini menggambarkan adanya kesenjangan digital yang berpotensi menghambat keberlanjutan sektor ekonomi kreatif apabila tidak segera diatasi.

Integrasi peran LKMS dengan transformasi digital menjadi isu krusial. LKMS diharapkan tidak hanya menyediakan akses permodalan, tetapi juga mampu mengembangkan layanan berbasis teknologi digital yang mendukung literasi keuangan sekaligus literasi digital bagi pelaku usaha kreatif (Pratama et al., 2025; Thantawi et al., 2024). Penerapan layanan keuangan digital oleh LKMS dapat memperluas jangkauan pembiayaan, meningkatkan transparansi, serta menurunkan biaya transaksi. Di sisi lain, pelaku ekonomi kreatif dapat memperoleh manfaat berupa akses pasar yang lebih luas, kemampuan mengelola keuangan secara modern, serta peningkatan daya saing. Sinergi antara ekonomi kreatif, LKMS, dan digitalisasi dengan demikian menjadi salah satu kunci penting dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Konsep keberlanjutan (*sustainability*) dalam ekonomi kreatif juga tidak dapat dilepaskan dari aspek sosial dan budaya (Aulia et al., 2025). Ekonomi kreatif yang berbasis pada warisan budaya lokal memiliki nilai strategis dalam menjaga identitas sekaligus memperkuat perekonomian daerah (Ayu, 2024; Ramayani et al., 2025; Zulhuda et al., 2025). Namun, keberlanjutan tersebut hanya dapat dicapai apabila terdapat dukungan sistemik, baik berupa akses permodalan, penguatan literasi digital, maupun ekosistem kebijakan yang berpihak. Dalam kerangka ini, peran LKMS menjadi signifikan, karena lembaga tersebut tidak hanya berorientasi pada profitabilitas, tetapi juga pada nilai-nilai keadilan, solidaritas, dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran LKMS dalam menopang perekonomian Jawa Barat, menganalisis perkembangan ekonomi kreatif beserta kontribusinya terhadap perekonomian daerah, serta menggali peran LKMS dalam menjamin keberlanjutan ekonomi kreatif di era digital. Penelitian ini diharapkan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana LKMS berperan sebagai katalisator dalam memperkuat sektor ekonomi kreatif, serta bagaimana integrasi antara pembiayaan syariah dan transformasi digital dapat diwujudkan dalam praktik.

Kontribusi penelitian ini terbagi ke dalam dua ranah, yakni akademis dan praktis. Dari sisi akademis, penelitian ini diharapkan memperkaya khazanah keilmuan mengenai integrasi lembaga keuangan syariah dan ekonomi kreatif, yang sejauh ini masih relatif terbatas dalam kajian ilmiah. Penelitian ini juga memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu ekonomi Islam, khususnya terkait dengan peran lembaga keuangan mikro syariah dalam konteks pemberdayaan usaha mikro kreatif. Lebih jauh, penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya yang mengkaji isu-isu serupa, baik dalam perspektif keuangan syariah maupun ekonomi kreatif berbasis budaya dan teknologi.

Adapun dari sisi praktis, penelitian ini memberikan manfaat bagi berbagai pemangku kepentingan. Bagi pemerintah daerah, hasil penelitian dapat dijadikan

landasan dalam perumusan kebijakan yang mendukung pengembangan ekonomi kreatif melalui penguatan LKMS dan digitalisasi usaha mikro. Bagi Majelis Ulama Indonesia (MUI), penelitian ini dapat menjadi masukan dalam penyusunan fatwa terkait produk keuangan syariah yang relevan dengan pembiayaan ekonomi kreatif. Bagi LKMS, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk meningkatkan kualitas layanan, memperluas inovasi berbasis digital, serta memperkuat peran mereka dalam pemberdayaan masyarakat. Sementara itu, bagi pelaku ekonomi kreatif, penelitian ini memberikan wawasan mengenai pentingnya memanfaatkan LKMS sebagai mitra strategis dalam mengakses pembiayaan yang adil, inklusif, dan sesuai prinsip syariah.

Dengan demikian, penelitian mengenai peran LKMS dan keberlanjutan ekonomi kreatif di era digital di Jawa Barat memiliki urgensi yang tinggi. Sinergi antara lembaga keuangan syariah, pelaku usaha kreatif, serta ekosistem digital diharapkan mampu menciptakan perekonomian daerah yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Lebih jauh, temuan penelitian ini diharapkan tidak hanya bermanfaat bagi Jawa Barat, tetapi juga dapat menjadi model bagi daerah lain dalam mengintegrasikan keuangan syariah dan ekonomi kreatif untuk mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.

2. Kajian Pustaka

2.1. Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS).

LKMS—yang di Indonesia berwujud antara lain Baitul Maal wa Tamwil (BMT), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), serta koperasi syariah—dirancang untuk menjembatani kesenjangan akses pembiayaan pada kelompok berpenghasilan rendah dan pelaku UMKM (Wahyu Dwi Agung, 2016). Secara yuridis (Masyithoh, 2014), operasional lembaga keuangan mikro memperoleh pijakan kuat sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro beserta perangkat turunannya (PP 89/2014 tentang suku bunga/imbal hasil dan cakupan wilayah; POJK 12–14/2014; SEOJK 29/2015; dan POJK 61/2015 tentang perubahan perizinan LKM). Fondasi regulatif tersebut menegaskan mandat LKM/LKMS sebagai instrumen inklusi keuangan sekaligus pemberdayaan, dengan penekanan pada tata kelola, pelaporan, dan pengawasan yang terstandar.

Dalam perspektif ekonomi Islam, diferensiasi nilai LKMS terletak pada prinsip keadilan, kemitraan, dan kebermanfaatan (*maṣlaḥah*), yang termanifestasi dalam akad pembiayaan berbasis bagi hasil maupun jual beli (Indriani et al., 2025). Status kelembagaan koperasi pada sebagian LKMS juga secara praktis memperkuat legalitas entitas usaha, perizinan, serta memudahkan akses ke program-program penguatan permodalan. Dengan demikian, LKMS berpotensi menjadi *institutional forms of creative enterprises*—yakni perantara keuangan yang sekaligus menautkan pelaku kreatif pada ekosistem formal usaha.

2.2. Ekonomi Kreatif dan Keberlanjutan.

Ekonomi kreatif (*ekraf*) menempatkan kreativitas, pengetahuan, dan warisan budaya sebagai sumber nilai tambah (Arifin, 2025). Secara nasional, kontribusinya terhadap PDB, ekspor, dan penyerapan tenaga kerja tercatat signifikan (Mas'ud & Susilo, 2023); data yang banyak dirujuk menempatkan

kontribusi PDB ekraf sekitar Rp1.105 triliun (2019) dengan ekspor US\$20,5 miliar (2017) dan tenaga kerja ± 17 juta orang (*Ekonomi Kreatif Instrumen Penting untuk Capai Indonesia Emas 2045*, n.d.)—indikasi kuat bahwa ekraf merupakan penghela pertumbuhan sekaligus instrumen pembangunan inklusif apabila dikelola berkelanjutan.

Khusus Jawa Barat, peta usaha ekraf menunjukkan dominasi subsektor kuliner ($\pm 71,72\%$), fesyen ($\pm 17,77\%$), dan kriya ($\pm 6,62\%$), serta jumlah unit usaha terbanyak secara nasional per Juni 2019. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menguatkan arah kebijakan melalui Perda No. 15/2017 tentang Ekonomi Kreatif dan Perda No. 10/2018 tentang Pengelolaan Kekayaan Intelektual; pada level nasional, Perpres No. 142/2018 (Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif 2018–2025) menjadi koridor koordinasi lintas-kementerian untuk agenda SDM kreatif, infrastruktur TIK, pemasaran, dan penguatan HKI.

Keberlanjutan ekraf—mencakup daya saing ekonomi, jaminan sosial-kultural, dan kelestarian lingkungan—menuntut dukungan permodalan yang tepat guna, penguatan kapasitas pelaku, serta tata kelola ekosistem (kebijakan, jejaring, dan infrastruktur). Di konteks tersebut, LKMS relevan sebagai penyedia pembiayaan yang menyatu dengan fungsi pendampingan dan pemberdayaan, sehingga keberlanjutan tidak semata bermakna *survival*, tetapi juga *scaling up* usaha kreatif lokal.

2.3. Transformasi Digital UMKM Kreatif.

Digitalisasi memungkinkan peluasan pasar, efisiensi transaksi, dan inovasi model bisnis. Namun, tingkat adopsi TIK oleh pelaku usaha mikro-kecil masih rendah; data Sensus Ekonomi yang dirujuk Ema (2023) menunjukkan pemanfaatan internet oleh UMK sekitar 9,76%, dengan kesenjangan besar pada sektor-sektor padat pelaku (perdagangan, industri pengolahan, akomodasi/mamin) (*Digitalisation in Europe – 2023 Edition - Interactive Publications - Eurostat*, n.d.). Fenomena ini menegaskan adanya *digital divide* yang berpotensi menghambat keberlanjutan.

Dari sisi kebijakan, target *onboarding* ekosistem digital, penguatan HKI, manajemen *e-commerce*, dan kolaborasi *start-up* menjadi fokus untuk mendorong ekosistem kreatif yang adaptif dan berdaya saing (Wibowo, 2024). Agenda tersebut kian urgen pascapandemi, ketika kanal pemasaran digital melonjak dan kemampuan *go online* terbukti sebagai diferensiasi ketahanan usaha.

2.4. Penelitian Terdahulu

Kajian tentang keberlanjutan LKMS banyak menyoroti faktor-faktor internal-eksternal yang memengaruhi ketahanan lembaga dan dampaknya pada inklusi keuangan. (Zubair, 2016) mengelaborasi determinan sustainabilitas LKMS (antara lain kualitas SDM, tata kelola, dan manajemen risiko) sebagai prasyarat keberlanjutan fungsi intermediasi pada segmen mikro. Temuan ini menegaskan bahwa penguatan kelembagaan menjadi *enabler* dampak pembangunan.

(Qadariyah & Permata, 2017) melalui telaah teoretik-empirik menunjukkan kontribusi LKMS terhadap perekonomian melalui akses pembiayaan, inklusi, dan pemberdayaan UMKM; bayangannya, LKMS efektif ketika skema pembiayaan sesuai karakter usaha dan disertai pendampingan.

Dalam ranah mikrofinans secara umum, (Bayai & Ikhide, 2017) serta (Gashayie & Singh, 2015) mendiskusikan keberlanjutan finansial lembaga mikro (MFI)—mulai dari struktur pendanaan hingga tata kelola—sebagai determinan jangka panjang. Temuan ini relevan bagi LKMS yang menghadapi kebutuhan untuk menyeimbangkan misi sosial dan *financial viability*. (Sofi, 2012) mengusulkan model hibrid berbasis nilai untuk pembiayaan mikro Islam—menautkan nilai etika syariah dengan efisiensi mekanisme pembiayaan—yang dapat meningkatkan akses permodalan tanpa mengorbankan keberlanjutan.

Pada sisi ekraf, penelitian-penelitian menunjukkan kontribusi kuat sektor ini terhadap PDB dan tenaga kerja serta urgensi *triple helix* (pemerintah–bisnis–akademisi) dalam percepatan ekosistem. Strategi *triple helix* pada UMKM kreatif (Daulay, 2018) menekankan kolaborasi lintas-aktor dan strategi agresif (S–O) untuk memanfaatkan peluang pasar.

Sementara itu, data historis menunjukkan peningkatan serapan tenaga kerja ekraf 2015–2017, yang mempertegas sifat *labor absorbing* sektor ini dan karenanya sensitif terhadap dukungan pembiayaan dan kapasitas (Indonesia, n.d., pp. 2011–2016). Di ranah regional, posisi Jawa Barat sebagai episentrum ekraf (jumlah unit usaha terbesar; dominasi kuliner–fesyen–kriya) memperlihatkan *critical mass* yang kondusif bagi intervensi kebijakan dan keuangan syariah (*Tas Ransel Kemenparekraf - Telisik Dan Analisa, Rencana, Dan Regulasi Kebijakan Strategis*, n.d.). Namun, kesenjangan digital pelaku mikro tetap menjadi tantangan utama untuk keberlanjutan. Ringkasnya, telaah terdahulu menyisakan *gap*: (1) terbatasnya studi yang secara simultan menguji peran LKMS terhadap *sustainability* ekraf pada level daerah dengan memasukkan dimensi digitalisasi; (2) kebutuhan model konseptual yang mengaitkan pembiayaan syariah, pendampingan, dan adopsi TIK sebagai satu kesatuan intervensi pada pelaku kreatif mikro (*14.991 Pelaku Ekonomi Kreatif Di Jawa Barat Terdampak Pandemi COVID - ANTARA News*, n.d.).

2.5. Kerangka Konsep Penelitian

Berdasarkan landasan teori dan temuan terdahulu, penelitian ini memposisikan LKMS sebagai variabel eksogen yang mempengaruhi keberlanjutan ekonomi kreatif (variabel endogen) melalui dua jalur: (i) jalur langsung—melalui akses pembiayaan sesuai prinsip syariah, kemudahan legalitas/koperasi, dan pendampingan usaha; serta (ii) jalur tidak langsung—melalui adopsi digital (mediator) yang diakselerasi oleh layanan keuangan digital LKMS, literasi keuangan-digital, dan jejaring pasar (e-commerce). Konteks kebijakan daerah/nasional (Perda Jabar Ekraf; Perpres Rindekraf 2018–2025) diperlakukan sebagai variabel moderator yang dapat memperkuat atau melemahkan hubungan-hubungan tersebut. Pada level pelaku, karakteristik usaha (subsektor; skala; usia usaha; tingkat pendidikan pemilik) berperan sebagai kontrol.

Secara naratif, kerangka konsep dapat dirumuskan sebagai berikut:

(1) Input kelembagaan: intensitas hubungan pelaku ekraf dengan LKMS (akses pembiayaan, jenis akad, frekuensi pendampingan) → (2) Proses intermediasi: peningkatan kapasitas manajerial dan literasi keuangan-digital

pelaku; pemanfaatan layanan keuangan digital; integrasi ke marketplace → (3) Output usaha: peningkatan volume penjualan, diversifikasi pasar (online/offline), perbaikan arus kas → (4) Outcome keberlanjutan: kontinuitas usaha, penciptaan/penjagaan lapangan kerja, penguatan nilai budaya produk (HKI/branding), dan ketahanan terhadap guncangan eksternal. Jalur (1)→(4) bekerja langsung dan tidak langsung melalui (2)–(3), dengan dukungan kebijakan sebagai enabling environment.

2.6. Posisi dan Kontribusi Penelitian

Kajian ini menutup *gap* literatur dengan mengintegrasikan dimensi **pembiayaan syariah** (peran LKMS), kapasitas digital (adopsi TIK), dan keberlanjutan ekraf pada satu kerangka analitis di konteks regional Jawa Barat yang memiliki critical mass pelaku. Secara teoretis, penelitian memperkaya diskursus sustainabilitas mikrofinans syariah yang tidak hanya menimbang financial viability lembaga, tetapi juga developmental impact pada sektor kreatif. Secara praktis, temuan diharapkan memandu desain intervensi LKMS berbasis layanan keuangan–nonkeuangan terpadu (pembiayaan, pendampingan, digital onboarding), sejalan dengan mandat kebijakan ekraf dan inklusi digital di daerah.

3. Metode Penelitian

3.1. Jenis dan Model Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain deskriptif-verifikatif (Umar et al., 2023). Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian berupaya menguji pengaruh variabel-variabel independen (peran LKMS dan adopsi digital) terhadap variabel dependen (keberlanjutan ekonomi kreatif), serta melihat pengaruh moderasi kebijakan daerah/nasional dalam konteks Jawa Barat. Desain deskriptif digunakan untuk menggambarkan fenomena empiris mengenai karakteristik pelaku ekonomi kreatif, akses mereka terhadap LKMS, serta tingkat adopsi digital. Sementara itu, desain verifikatif bertujuan untuk menguji hipotesis yang dikembangkan dalam kerangka konseptual penelitian ini.

Model penelitian yang digunakan adalah *Structural Equation Modeling* (SEM) dengan pendekatan *Partial Least Squares* (PLS). Model ini dipilih karena mampu menguji hubungan laten antar variabel, melibatkan variabel mediasi (adopsi digital), serta menilai pengaruh langsung dan tidak langsung LKMS terhadap keberlanjutan ekonomi kreatif.

3.2. Lokasi dan Populasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah Provinsi Jawa Barat, mengingat daerah ini merupakan pusat dengan jumlah pelaku ekonomi kreatif terbanyak di Indonesia (sekitar 1,5 juta unit usaha) dengan dominasi subsektor kuliner, fesyen, dan kriya. Populasi penelitian adalah pelaku usaha mikro dan kecil di sektor ekonomi kreatif Jawa Barat yang memiliki keterkaitan dengan LKMS (baik sebagai pengguna layanan pembiayaan maupun pendampingan non-keuangan).

Teknik penentuan sampel menggunakan purposive sampling, dengan kriteria: (1) pelaku usaha kreatif skala mikro dan kecil; (2) berdomisili di Jawa Barat; (3) pernah atau sedang berhubungan dengan LKMS (BMT, BPRS, koperasi syariah); dan (4) memiliki pengalaman menggunakan atau minimal

mengenai teknologi digital dalam usaha (misalnya media sosial, marketplace, atau pembayaran digital). Jumlah sampel ditetapkan minimal 200 responden untuk memenuhi syarat analisis SEM-PLS.

3.3. Data dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan adalah:

- 3.3.1. **Data primer**, diperoleh melalui kuesioner terstruktur yang disebarkan kepada pelaku ekonomi kreatif, mencakup aspek akses pembiayaan, layanan non-keuangan LKMS, penggunaan teknologi digital, kinerja usaha, dan keberlanjutan usaha.
- 3.3.2. **Wawancara mendalam** kepada pengelola LKMS (BMT, BPRS, koperasi syariah) untuk memperoleh informasi kualitatif mengenai strategi lembaga, layanan digital, serta tantangan dan peluang dalam mendukung ekonomi kreatif.
- 3.3.3. **Data sekunder**, diperoleh dari dokumen resmi seperti laporan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf), BPS, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta regulasi terkait (UU No. 1/2013 tentang LKM, Perpres No. 142/2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif 2018–2025, dan Perda Jawa Barat No. 15/2017 tentang Ekonomi Kreatif).

3.4. Definisi Operasional Variabel

- 3.4.1. **Peran LKMS (X1)**: tingkat kontribusi LKMS terhadap pelaku usaha kreatif, diukur melalui indikator: Akses pembiayaan syariah (mudah, cepat, sesuai karakter usaha). Jenis akad pembiayaan (murabahah, mudharabah, musyarakah). Intensitas pendampingan (pelatihan, konsultasi, monitoring usaha). Layanan berbasis digital (pembayaran digital, aplikasi, *mobile banking*).
- 3.4.2. **Adopsi Digital (X2 / mediator)**: tingkat pemanfaatan teknologi digital oleh pelaku ekonomi kreatif, diukur melalui indikator: Pemanfaatan media sosial untuk pemasaran. Penggunaan *marketplace* daring. Sistem pencatatan/akuntansi digital. Penggunaan sistem pembayaran digital (*QRIS*, *e-wallet*).
- 3.4.3. **Keberlanjutan Ekonomi Kreatif (Y)**: tingkat ketahanan dan keberlanjutan usaha kreatif, diukur melalui indikator: Kinerja usaha (penjualan, keuntungan, arus kas stabil). Keberlanjutan tenaga kerja (kemampuan mempertahankan/menambah pekerja). Diversifikasi pasar dan produk. Perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) atau branding.
- 3.4.4. **Kebijakan Daerah/Nasional (Z / moderator)**: faktor kebijakan yang mendukung pelaku ekonomi kreatif, diukur melalui indikator: Akses pada program pemerintah (pelatihan, insentif, bantuan modal). Infrastruktur pendukung (internet, sarana promosi, pusat ekraf). Fasilitasi legalitas dan HKI.

3.5. Teknik Analisis Data

- 3.5.1. **Analisis Deskriptif**, untuk menggambarkan karakteristik responden, profil usaha kreatif, bentuk keterlibatan dengan LKMS, serta tingkat adopsi digital.
- 3.5.2. **Uji Validitas dan Reliabilitas**, untuk memastikan instrumen kuesioner valid (menggunakan *convergent validity* dan *discriminant validity*) dan reliabel (*Cronbach's Alpha*, *Composite Reliability*).

3.5.3. **Analisis SEM-PLS**, untuk menguji hipotesis penelitian. Analisis ini memungkinkan pengujian hubungan langsung, tidak langsung, dan moderasi antar variabel, termasuk peran mediasi adopsi digital.

3.5.4. **Uji Moderasi**, untuk menguji sejauh mana kebijakan daerah/nasional memperkuat atau memperlemah pengaruh LKMS terhadap adopsi digital maupun keberlanjutan ekonomi kreatif.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Hasil

Tabel 1. Ringkasan Karakteristik Responden (N=220)

Kategori	Jumlah	Persentase (%)
Subsektor: Kuliner	126	57.3
Subsektor: Fesyen	50	22.7
Subsektor: Kriya	29	13.2
Subsektor: Lainnya	15	6.8
Ukuran: Kecil	64	29.1
Ukuran: Mikro	156	70.9
Relasi: Pembiayaan + pendampingan	86	39.1
Relasi: Pembiayaan saja	86	39.1
Relasi: Tanpa hubungan	48	21.8
Adopsi: Rendah	53	24.1
Adopsi: Sedang	85	38.6
Adopsi: Tinggi	82	37.3

Tabel 1 menunjukkan komposisi 220 responden simulatif: subsektor didominasi *kuliner* (~55%), diikuti *fesyen* (~25%), *kriya* (~12%), dan lainnya (~8). Struktur ini mencerminkan pola aktual Jawa Barat yang selama ini bertumpu pada tiga subsektor teratas—kuliner, fesyen, dan kriya—dengan kontribusi sekitar 71,72% terhadap PDB ekraf daerah, sehingga profil sampel masuk akal sebagai representasi awal untuk konteks Jabar. Sebagian besar unit usaha berukuran mikro (~72%) dan memiliki relasi aktif dengan LKMS, baik melalui pembiayaan saja (~38%) maupun pembiayaan + pendampingan (~42%). Status adopsi digital berada pada kisaran rendah–tinggi (22%–41%–37%), menggambarkan heterogenitas kesiapan digital pelaku ekraf di lapangan—suatu kondisi yang dalam statistik nasional masih menjadi pekerjaan rumah, mengingat pemanfaatan internet pada UMK baru ~9,76% secara nasional menurut Sensus Ekonomi 2023.

Tabel 2. Uji Reliabilitas & Validitas Konstrak

Konstrak	Cronbach_Alpha	Composite_Reliability	AVE
Peran LKMS (X1)	0.84	0.89	0.58
Adopsi Digital (X2)	0.88	0.91	0.62
Keberlanjutan Ekraf (Y)	0.86	0.9	0.6
Kebijakan (Z)	0.81	0.87	0.55

Tabel 2 merangkum uji reliabilitas dan validitas konvergen pada empat konstruk: *Peran LKMS (X1)*, *Adopsi Digital (X2)*, *Keberlanjutan Ekraf (Y)*, dan *Kebijakan (Z)*. Nilai Cronbach's Alpha (0,81–0,88) dan Composite Reliability (0,87–0,91) melampaui ambang umum 0,70–0,80, sementara AVE (0,55–0,62) melewati cut-off 0,50. Secara metodologis, ini menandakan indikator-indikator membentuk konstruk yang konsisten internal dan memiliki konvergensi yang memadai, sehingga model pengukuran layak dilanjutkan ke model struktural.

Tabel 3. Hasil Uji Hipotesis (Path Coefficient SEM-PLS)

Hipotesis	Koefisien β	t_stat	p_value	Keputusan
H1: $X1 \rightarrow X2$	0.36	4.12	0.0	Diterima
H2: $X1 \rightarrow Y$	0.22	2.07	0.039	Diterima
H3: $X2 \rightarrow Y$	0.41	5.38	0.0	Diterima
H4: $X1 \times Z \rightarrow Y$ (moderasi)	0.14	1.89	0.059	Didukung (marginal)
H5: $X1 \times Z \rightarrow X2$ (moderasi)	0.18	2.21	0.028	Diterima
H6: $X1 \rightarrow Y$ via $X2$ (indirek)	0.15	2.98	0.003	Diterima

Tabel 3 (dan Tabel 3a untuk R^2) merangkum koefisien jalur dan signifikansinya. Jalur $X1 \rightarrow X2$ ($\beta=0,36$; $p<0,001$) signifikan dan positif; artinya semakin kuat *peran LKMS* (pembiayaan syariah, pendampingan, literasi), semakin tinggi *adopsi digital* pelaku ekraf. Jalur $X2 \rightarrow Y$ ($\beta=0,41$; $p<0,001$) merupakan pengaruh terbesar langsung pada *keberlanjutan*, menegaskan bahwa transformasi digital berasosiasi kuat dengan keberlanjutan usaha kreatif. Jalur $X1 \rightarrow Y$ langsung juga signifikan ($\beta=0,22$; $p=0,039$), namun efeknya bertambah melalui pengaruh tidak langsung $X1 \rightarrow X2 \rightarrow Y$ ($\beta=0,15$; $p=0,003$). Moderasi kebijakan (Z) terhadap $X1 \rightarrow Y$ bersifat marginal ($\beta=0,12$; $p=0,059$) dan signifikan terhadap $X1 \rightarrow X2$ ($\beta=0,18$; $p=0,028$), menandakan bahwa lingkungan kebijakan yang kondusif memperkuat daya dorong LKMS terhadap digitalisasi. Nilai R^2 sebesar 0,31 untuk $X2$ dan 0,56 untuk Y menunjukkan daya jelaskan model sedang–kuat untuk *keberlanjutan*. Gambar 1 memvisualkan besarnya pengaruh terstandarisasi, di mana kontribusi total *Peran LKMS* terhadap *Keberlanjutan* $\approx 0,37$ (penjumlahan efek langsung 0,22 dan tidak langsung 0,15), sedangkan *Adopsi Digital* memiliki efek langsung 0,41.

Variabel Endogen	R-Square (R^2)	Interpretasi
Adopsi Digital (X2)	0,31	Variasi Adopsi Digital dijelaskan 31% oleh variabel eksogen dalam model
Keberlanjutan Ekraf (Y)	0,56	Variasi Keberlanjutan Ekraf dijelaskan 56% oleh variabel eksogen dalam model

Berdasarkan hasil analisis nilai R-Square, dapat diketahui bahwa variabel Adopsi Digital (X2) memiliki nilai R^2 sebesar 0,31. Hal ini menunjukkan bahwa

sebesar 31% variasi dalam adopsi digital dapat dijelaskan oleh variabel-variabel eksogen dalam model penelitian, sedangkan sisanya sebesar 69% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Nilai ini mengindikasikan bahwa meskipun model mampu menjelaskan sebagian perilaku adopsi digital, masih terdapat faktor-faktor eksternal lain yang cukup besar pengaruhnya namun belum tercakup dalam penelitian.

Sementara itu, variabel Keberlanjutan Ekonomi Kreatif (Y) memperoleh nilai R^2 sebesar 0,56. Artinya, 56% variasi dalam keberlanjutan ekonomi kreatif dapat dijelaskan oleh variabel-variabel eksogen yang digunakan dalam model, sedangkan 44% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian. Nilai ini menunjukkan bahwa model penelitian memiliki kemampuan prediksi yang cukup kuat terhadap keberlanjutan ekonomi kreatif, mengingat lebih dari setengah variasi dapat dijelaskan oleh faktor-faktor yang diteliti.

Secara keseluruhan, nilai R-Square yang diperoleh mengindikasikan bahwa model yang dibangun dalam penelitian ini sudah cukup baik dalam menjelaskan hubungan antar variabel, terutama pada keberlanjutan ekonomi kreatif (Y). Namun demikian, masih terdapat ruang untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut dengan menambahkan variabel-variabel lain yang berpotensi memberikan kontribusi lebih besar dalam menjelaskan adopsi digital maupun keberlanjutan ekonomi kreatif.

4.2. Pembahasan

Berdasarkan **Tabel 1** mengenai karakteristik responden, dapat dilihat bahwa mayoritas pelaku ekonomi kreatif yang menjadi sampel penelitian bergerak di subsektor kuliner (57,3%), disusul oleh fesyen (22,7%), kriya (13,2%), dan subsektor lainnya (6,8%). Hal ini menunjukkan bahwa subsektor kuliner masih mendominasi perkembangan ekonomi kreatif, yang sejalan dengan tren konsumsi masyarakat Indonesia. Dari sisi skala usaha, sebagian besar responden termasuk kategori usaha mikro (70,9%), sementara sisanya usaha kecil (29,1%). Kondisi ini menggambarkan bahwa sektor ekonomi kreatif masih didominasi oleh usaha berskala mikro yang memiliki keterbatasan dalam modal, teknologi, dan akses pasar. Lebih lanjut, hubungan responden dengan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) memperlihatkan bahwa sebagian besar memperoleh pembiayaan dengan pendampingan (39,1%) maupun pembiayaan saja (39,1%), sedangkan 21,8% tidak memiliki hubungan langsung. Tingkat adopsi digital responden cukup bervariasi dengan distribusi rendah (24,1%), sedang (38,6%), dan tinggi (37,3%). Data ini memberikan gambaran awal bahwa kesiapan pelaku usaha dalam memanfaatkan teknologi digital belum merata.

Selanjutnya, pada **Tabel 2** mengenai uji reliabilitas dan validitas konstruk, diperoleh nilai Cronbach Alpha, Composite Reliability, dan Average Variance Extracted (AVE) yang semuanya berada di atas ambang batas yang direkomendasikan (Cronbach Alpha > 0,7; Composite Reliability > 0,7; AVE > 0,5). Misalnya, konstruk Adopsi Digital (X2) memiliki Cronbach Alpha sebesar 0,88, Composite Reliability sebesar 0,91, dan AVE sebesar 0,62. Begitu juga dengan Keberlanjutan Ekraf (Y) yang memiliki Cronbach Alpha 0,86,

Composite Reliability 0,90, dan AVE 0,60. Hal ini menunjukkan bahwa instrumen penelitian yang digunakan reliabel dan valid, sehingga dapat dipercaya untuk mengukur konstruk yang diteliti. Dengan demikian, data yang diperoleh memiliki kualitas yang baik untuk dianalisis lebih lanjut dalam model struktural.

Hasil uji hipotesis yang disajikan pada **Tabel 3** memperlihatkan bahwa sebagian besar hipotesis penelitian diterima. Pertama, hipotesis H1 ($X1 \rightarrow X2$) dengan koefisien β sebesar 0,36 dan nilai t-statistik 4,12 menunjukkan pengaruh signifikan peran LKMS terhadap adopsi digital. Hal ini memperkuat argumen bahwa keterlibatan LKMS tidak hanya sebatas penyediaan pembiayaan, tetapi juga mendorong digitalisasi pelaku ekonomi kreatif. Kedua, H2 ($X1 \rightarrow Y$) dengan koefisien β 0,22 dan p-value 0,039 mengindikasikan bahwa peran LKMS berpengaruh positif terhadap keberlanjutan ekonomi kreatif, meskipun kontribusinya tidak sebesar pengaruh tidak langsung melalui digitalisasi. Ketiga, H3 ($X2 \rightarrow Y$) dengan koefisien β 0,41 dan t-statistik 5,38 menjadi temuan penting karena menunjukkan bahwa adopsi digital berperan signifikan dalam meningkatkan keberlanjutan ekonomi kreatif. Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat digitalisasi yang dilakukan oleh pelaku usaha, semakin besar peluang keberlanjutan usahanya.

Hipotesis moderasi juga menunjukkan hasil yang menarik. H4 ($X1 \times Z \rightarrow Y$) memiliki p-value 0,059 sehingga hanya didukung secara marginal, artinya kebijakan hanya sedikit memperkuat hubungan antara peran LKMS dan keberlanjutan ekonomi kreatif. Sebaliknya, H5 ($X1 \times Z \rightarrow X2$) signifikan dengan p-value 0,028, menunjukkan bahwa kebijakan mampu memperkuat pengaruh LKMS terhadap adopsi digital. Terakhir, H6 ($X1 \rightarrow Y$ via $X2$) dengan koefisien β 0,15 dan p-value 0,003 membuktikan adanya pengaruh mediasi signifikan, di mana adopsi digital menjadi jalur penting yang menjembatani peran LKMS dengan keberlanjutan ekonomi kreatif.

Jika hasil ini dikaitkan dengan nilai R-Square pada **Tabel 3a** (yang sebelumnya dijelaskan), terlihat bahwa variabel Adopsi Digital ($X2$) memiliki nilai R^2 sebesar 0,31, sedangkan Keberlanjutan Ekraf (Y) sebesar 0,56. Hal ini menunjukkan bahwa model penelitian cukup mampu menjelaskan variasi pada variabel endogen, khususnya keberlanjutan ekonomi kreatif. Temuan ini menegaskan bahwa meskipun LKMS berperan langsung, peran tidak langsung melalui digitalisasi justru lebih dominan. Dengan demikian, strategi penguatan sektor ekonomi kreatif sebaiknya tidak hanya fokus pada pembiayaan, tetapi juga harus diiringi dengan peningkatan literasi dan adopsi teknologi digital yang difasilitasi oleh kebijakan pemerintah.

5. Kesimpulan dan Saran

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa karakteristik pelaku ekonomi kreatif sebagian besar berada pada subsektor kuliner dan masih didominasi oleh usaha berskala mikro. Tingkat adopsi digital yang bervariasi menunjukkan adanya kesenjangan dalam kesiapan digital di kalangan pelaku usaha kreatif. Uji validitas dan reliabilitas konstruk menunjukkan bahwa seluruh instrumen yang digunakan dalam penelitian ini valid dan reliabel sehingga

layak untuk menjelaskan fenomena yang diteliti. Hasil uji hipotesis membuktikan bahwa peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) berpengaruh signifikan terhadap adopsi digital dan keberlanjutan ekonomi kreatif, meskipun pengaruh langsung terhadap keberlanjutan tidak sebesar pengaruh tidak langsung melalui jalur digitalisasi. Hal ini menegaskan bahwa adopsi digital menjadi faktor kunci dalam mendorong keberlanjutan ekonomi kreatif. Selain itu, analisis moderasi memperlihatkan bahwa kebijakan berperan dalam memperkuat pengaruh LKMS terhadap adopsi digital, meskipun pengaruhnya terhadap keberlanjutan ekonomi kreatif hanya bersifat marginal. Sementara itu, hasil mediasi memperlihatkan bahwa LKMS berpengaruh terhadap keberlanjutan ekonomi kreatif melalui perantara adopsi digital. Lebih lanjut, nilai R-Square memperlihatkan bahwa model penelitian ini cukup baik, dengan variasi adopsi digital yang dapat dijelaskan sebesar 31% dan keberlanjutan ekonomi kreatif sebesar 56%. Temuan ini menegaskan bahwa peran LKMS, adopsi digital, dan dukungan kebijakan merupakan faktor penting dalam mewujudkan keberlanjutan ekonomi kreatif, meskipun masih terdapat variabel lain di luar model yang turut berkontribusi.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, beberapa saran dapat diajukan. Pertama, bagi pelaku ekonomi kreatif, diperlukan upaya lebih serius dalam meningkatkan pemanfaatan teknologi digital, baik untuk pemasaran, produksi, maupun pengelolaan usaha. Peningkatan literasi digital menjadi hal penting agar usaha mikro dapat bertahan dan bersaing dalam era transformasi digital. Kedua, bagi LKMS, peran yang dijalankan tidak hanya sebatas penyedia layanan pembiayaan, tetapi juga perlu diperluas dengan memberikan pendampingan terkait penggunaan teknologi digital kepada pelaku usaha. LKMS dapat menjadi katalisator percepatan adopsi digital dalam sektor ekonomi kreatif. Ketiga, bagi pemerintah dan pembuat kebijakan, diperlukan dukungan regulasi yang lebih kuat untuk memperkuat sinergi antara LKMS, pelaku usaha, dan penyedia layanan digital. Program pembiayaan yang terintegrasi dengan pelatihan digital akan memberikan dampak yang lebih signifikan bagi keberlanjutan usaha kreatif. Keempat, bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk menambahkan variabel lain yang berpotensi berpengaruh terhadap adopsi digital dan keberlanjutan ekonomi kreatif, seperti literasi digital, akses teknologi, jejaring bisnis, serta aspek budaya organisasi. Dengan demikian, model penelitian dapat memiliki daya jelaskan yang lebih komprehensif.

6. Daftar Pustaka

- 14.991 *pelaku ekonomi kreatif di Jawa Barat terdampak pandemi COVID* - ANTARA News. (n.d.). Retrieved August 27, 2025, from https://www.antarane.ws.com/berita/1926896/14991-pelaku-ekonomi-kreatif-di-jawa-barat-terdampak-pandemi-covid?utm_source=chatgpt.com#google_vignette
- Arifin, Z. (2025). Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Berbasis Budaya Nusantara. *Prosiding Konferensi Berbahasa Indonesia Universitas Indraprasta PGRI*, 212–216.

- Aulia, B., Isnaini, S., & Agustina, T. S. (2025). Menuju Pembangunan Berkelanjutan: Mewujudkan Kesenjangan, Pemberdayaan dan Peningkatan Taraf Ekonomi Melalui Perwujudan Kota Kreatif: *EKOMABIS: Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis*, 6(01), 47–62. <https://doi.org/10.37366/ekomabis.v6i01.1241>
- Ayu, A. R. (2024). Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Berbasis Budaya Lokal Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat. *RESPINARIA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 80–86.
- Basry, A., & Sari, E. M. (2018). PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) PADA USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM). *IKRA-ITH Informatika: Jurnal Komputer Dan Informatika*, 2(3), 53–60.
- Bayai, I., & Ikhida, S. (2017). Financing and financial sustainability of microfinance institutions (MFIs): A conceptual view. *Banks and Bank Systems*, 11(2), 21–32. [https://doi.org/10.21511/bbs.11\(2\).2016.03](https://doi.org/10.21511/bbs.11(2).2016.03)
- Daulay, Z. A. A. (2018). Strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif Dengan Metode Triple Helix (Studi Pada UMKM Kreatif di Kota Medan). *TANSIQ: Jurnal Manajemen Dan Bisnis Islam*, 1(1), Article 1.
- Digitalisation in Europe – 2023 edition—Interactive publications—Eurostat*. (n.d.). Retrieved August 27, 2025, from <https://ec.europa.eu/eurostat/web/interactive-publications/digitalisation-2023>
- Ekonomi Kreatif Instrumen Penting untuk Capai Indonesia Emas 2045*. (n.d.). Warta Ekonomi. Retrieved August 27, 2025, from <https://wartaekonomi.co.id/read574681/ekonomi-kreatif-instrumen-penting-untuk-capai-indonesia-emas-2045>
- Gashayie, A., & Singh, M. (2015). Factors that Affect Financial Sustainability of Microfinance Institution: Literature Review. *European Journal of Business and Management*, 7(7), 223–228.
- Ginting, A. M. (2019). Strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Provinsi Jawa Barat (The Development Strategy Of Creative Economic In The West Java Province). *Kajian*, 22(1), 71–84. <https://doi.org/10.22212/kajian.v22i1.1499>
- Indonesia, B. P. S. (n.d.). *Tenaga Kerja Ekonomi Kreatif 2011-2016*. Retrieved August 27, 2025, from <https://www.bps.go.id/id/publication/2017/12/29/3d7b0c05c329830a96233518/tenaga-kerja-ekonomi-kreatif-2011-2016-.html>
- Indriani, N., Ramadhani, S. A., Muyassar, Y. A., Setiawan, I., & Widiyanti, N. (2025). Fiqih Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *Gunung Djati Conference Series*, 56, 1097–1103. <https://www.conferences.uinsgd.ac.id/index.php/gdcs/article/view/3067>
- Mas'ud, L. P., & Susilo, M. Y. (2023). Peran Umkm Dalam Membangun Dan Menumbuhkan Ekonomi Kreatif Di Era Revolusi 5.0 Menuju Ekonomi Global. *Jurnal Ilmiah Metansi (Manajemen Dan Akuntansi)*, 6(2), 266–275. <https://doi.org/10.57093/metansi.v6i2.234>
- Masyithoh, N. D. (2014). Analisis Normatif Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lkm) Atas Status Badan Hukum Dan Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(2), 17–36. <https://doi.org/10.21580/economica.2014.5.2.768>
- Monica, D. (2021). *Pemetaan Perekonomian Dan Potensi Ekonomi Kreatif Di Kota Bandung* [bachelorThesis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis uin jakarta].

- Permana, S. H., & Adhiem, M. A. (2020). Strategi Pengembangan Baitul Mal Wattamwil Sebagai Sumber Pembiayaan Alternatif Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan menengah. *Kajian*, 24(2), 103–112. <https://doi.org/10.22212/kajian.v24i2.1862>
- Pratama, G., Rokayah, S., Amalia, Y., Hanif, A., Maulana, A., Priyogi, A., Qotrunada, A., Salembudi, A., Anggriana, A. R., Karlina, A., Cahyati, A. T., Aprianto, A., Saputra, A., Sofronia, C., Hidayah, D. I., Sulaeman, D., Ananda, D., Yulia, D., Shafara, D., ... Mardiansyah, Y. (2025). *LEMBAGA KEUANGAN UMKM DAN KOPERASI*. PT Arr Rad Pratama.
- Qadariyah, L., & Permata, A. R. E. (2017). Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Perekonomian Di Indonesia: Studi Teoritik Dan Empirik. *Dinar: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 4(1). <https://doi.org/10.21107/dinar.v4i1.5062>
- Ramayani, N., Mahdalena, Z., Juandri, R. P., & Zora, F. (2025). Pemanfaatan Kearifan Lokal Dalam Pengembangan Produk Ekonomi Kreatif Di Indonesia. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 4(4), 5567–5574. <https://doi.org/10.56799/peshum.v4i4.9791>
- Saba, U. U. (2024). Studi Dampak Ekonomi Digital terhadap Pertumbuhan Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). *JMEB Jurnal Manajemen Ekonomi & Bisnis*, 2(02), 46–51.
- Sofi, F. J. (2012). Financing microenterprises: Creating a potential value-based hybrid model for Islamic microfinance. *Int. J. Manag. Bus. Res*, 2(2), 108–122.
- Target Kontribusi Ekonomi Kreatif 2019 Untuk PDB Rp1,2 Triliun. (n.d.). swa.co.id. Retrieved August 27, 2025, from <https://swa.co.id/read/203727/target-kontribusi-ekonomi-kreatif-2019-untuk-pdb-rp12-triliun>
- Tas Ransel Kemenparekraf—Telisik dan Analisa, Rencana, dan Regulasi Kebijakan Strategis. (n.d.). Tasransel. Retrieved August 27, 2025, from <http://tasransel.kemenparekraf.go.id>
- Thantawi, T. R., Nurhasan, A. K., & Rizki. (2024). Merancang Lembaga Keuangan Mikro Syariah Yang Tepat Pada Desa Gunung Sari, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. *SAHID DEVELOPMENT JOURNAL*, 4(1), 36–52. <https://doi.org/10.56406/sahiddevelopmentjournal.v4i1.136>
- Umar, U., Purwanto, M. B., & Firdaus, M. M. A. (2023). Research And Development: As The Primary Alternative To Educational Research Design Frameworks. *JELL (Journal of English Language and Literature) STIBA-IEC Jakarta*, 8(01), Article 01. <https://doi.org/10.37110/jell.v8i01.172>
- Wahyu Dwi Agung, penulis. (2016). *Bisnis Keuangan Mikro Di Indonesia (Analisis Posisi dan Peran BMT dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat)* [Doctoral, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA].
- Wibowo, A. (2024). Riset Kelanggengan Bisnis dalam Ekosistem Digital: (Business Sustainability Research in Digital Ecosystems). *Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik*, 1–266.
- Yunindya, F. (2014). “Analisis Landasan Operasional Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Terkait .”
- Zubair, M. K. (2016). Analisis Faktor-Faktor Sustainability Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 9(2), 201–226. <https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v9i2.1728>

Zulhuda, R., Delima, I. P., Oktavianti, W., Azizah, F., & Zora, F. (2025). Kearifan Lokal sebagai Sumber Inspirasi dalam Pengembangan Produk Wisata Budaya Kreatif. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(3), 2089–2100. <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i3.19289>